

ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA KOTA BITUNG DAN KOTA TOMOHON PERIODE ANGGARAN 2010 - 2014

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY ON BITUNG CITY AND TOMOHON CITY AT FISCAL YEAR 2010 - 2014

Oleh :
Donny Oktavianus¹
Sri Murni²
Ivonne S. Saerang³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Reguler Sore
Universitas Sam Ratulangi

e-mail: ¹donny.oktamara@gmail.com
²srimurnirustandi@yahoo.co.id
³ivonnesaerang@yahoo.com

Abstrak: Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan perbandingan tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dan Tomohon periode 2010 – 2014. Metode yang digunakan Deskriptif Komparatif dan teknik pengumpulan data adalah data sekunder. Perhitungan dilakukan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Data yang diambil adalah laporan realisasi APBD Kota Bitung dan Tomohon periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan Kota Bitung dalam tingkat kemampuan keuangan mengelola rumah tangganya lebih unggul dibandingkan Kota Tomohon. Akan tetapi kedua kota tersebut masih dikategorikan tidak mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk pemerintah daerah Kota Bitung dan Tomohon sebaiknya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan lagi ketaatan wajib pajak dan membayar retribusi serta pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah dengan kualitas, kemudahan, dan ketepatan serta kecepatan pelayanan.

Kata kunci: kemampuan keuangan, kemandirian, desentralisasi fiskal daerah

Abstract: Regional financial capability in managing finance is reflected in the Regional Budget that describes the ability of local governments in financing the activities of the development, as well as equity and justice by developing the entire potential of each region. The purpose of this research is to know the regional financial capability and the comparison of regional financial capability level of Tomohon and Bitung cities in the period of 2010 – 2014. Method used is the comparative Descriptive and data collection technique is the secondary data. The calculation is done using analysis ratio of the financial independence of the region, the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of the index of the ability of the routine, the ratio of harmony, and the ratio of growth. Data taken are from the regional budget realization report of Bitung and Tomohon cities period 2010-2014. The results show that Bitung city in levels of financial capability to manage its household is more superior compared to Tomohon. However both cities of are still categorized not capable in carrying out regional autonom. The local Governments of Tomohon and Bitung cities should improve the area's original revenue by raising compliance of taxpayers and levy as well as control and oversight over the original revenue collection area with quality, ease, and accuracy and speed of service.

Keywords: financial capability, independence, fiscal decentralization of the regional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak pertengahan pada tahun 1997, krisis moneter ekonomi menerpa Indonesia yang menyebabkan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan tetapi memberikan dampak baik pada aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan membuka pintu untuk reformasi total sehingga terciptanya *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya atau segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yaitu, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2011: 169 ; Wulandari, 2001: 20). Umumnya kegiatan operasi dalam perusahaan berorientasi laba, berbeda halnya dengan sektor pemerintahan yang ingin dicapai bukanlah laba tetapi kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga cara pengukurannya berbeda.

Kota Bitung dan Kota Tomohon merupakan salah satu daerah Kota yang ada di Sulawesi Utara yang dalam hal ini sedang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan di daerahnya yang menjadi objek penelitian penulis dalam analisis perbandingan kemampuan keuangan daerah dilihat dari struktur APBD periode 2010-2014.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan juga perbandingan tingkat pada Provinsi Sulawesi Utara yaitu pada Kota Bitung dan Tomohon khususnya periode 2010-2014 dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Halim (2007: 19) mengartikan bahwa keuangan daerah adalah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum Pasal 156 ayat (1) disebutkan, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian tersebut, disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang dan barang yang dapat dijadikan bentuk kekayaan daerah selama belum dimiliki oleh negara atau daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 amandemen II tahun 2000 adalah hak dan wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam menjalankan pemerintahan dimana tata cara penyelenggaraannya diatur dalam undang-undang. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Menurut Pasal 16 Permendagri No.13/2006, APBD memiliki fungsi yaitu; otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi.

Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu cara pengukuran kinerja yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting yang menjadi bahan perbandingan dalam menemukan kondisi tren yang terjadi. Analisis rasio pada pemerintahan daerah dikembangkan dari data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian Terdahulu

Efendi (2011) dalam penelitiannya dengan judul: Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan OTODA Di Kabupaten Nganjuk. Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah di kabupaten nganjuk dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2005-2009. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti rasio-rasio yang sama yaitu mengenai rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Sedangkan, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya peneliti tidak menggunakan faktor yang sama yaitu mengenai perbandingan kemampuan keuangan daerah.

Mahardika (2011) dalam penelitiannya yang berjudul: Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era otonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Tabanan pada tahun 2007-2011. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah yang sama. Sedangkan, perbedaannya adalah peneliti tidak menggunakan faktor yang sama yaitu mengenai perbandingan kemampuan keuangan daerah.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan beberapa langkah, yang dilakukan peneliti adalah menentukan latar belakang masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, pengumpulan data, hasil dan pembahasan data, kesimpulan dan saran.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu jenis data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Nazir, 2003: 124). Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data berkala (*time series*) yang berasal dari data publikasi pemerintah Kota Bitung dan Tomohon periode 2010 sampai dengan 2014.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan baik berupa dokumen, catatan-catatan, arsip, maupun artikel. Data yang didapatkan kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian ini (Nazir, 2003: 124).

Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), teknik ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah Kantor Walikota Bitung dan Kantor Walikota Tomohon periode anggaran 2010-2014 sebagai objek penelitian dan melakukan wawancara dengan karyawan dan sekretaris daerah dan kepala bidang untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini..
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dengan cara mendapatkan informasi dan teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu (Nazir, 2003: 58). Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat/provinsi ataupun dari pinjaman (Mahmudi, 2011: 170).

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Prov. Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00% - 25,00%	Instruktif
Rendah	25,01% - 50,00%	Konsultatif
Sedang	50,01% - 75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01% - 100%	Delegatif

Sumber : Wulandari (2001: 20)

Keterangan:

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2011:169).

$$\text{Derajat Desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Presentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Wulandari (2001: 22)

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks kemampuan rutin dihitung berdasarkan proposi antara pendapatan asli daerah dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005.

$$\text{Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

Tabel 3. Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

Presentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00	Sangat kurang
20,01-40,00	Kurang
40,01-60,00	Cukup
60,01-80,00	Baik
80,01-100	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001:22)

Rasio Keserasian

Rasio Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Mahmudi, 2010: 143). Rumus rasio keserasian yang digunakan dalam analisis ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Dalam rasio ini akan dilihat empat pertumbuhan komponen APBD yaitu: PAD, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode lainnya.

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

$$P_n - P_o$$

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Data yang dihitung pada tahun ke-0

R = Pertumbuhan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4. Perhitungan Tingkat Kemandirian Kota Bitung

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Transfer	Rasio	Kemampuan Keuangan
2010	18.763.528.960,85	406.552.501.953	0.04%	Instruktif
2011	25.394.063.796,63	464.799.438.856	0.05%	Instruktif
2012	38.435.120.911,59	517.135.271.153	0.07%	Instruktif
2013	55.173.113.990,88	596.163.830.338	0.09%	Instruktif
2014	83.529.151.103	656.612.029.588	0.12%	Instruktif
Rata-rata			0.08%	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Bitung (Data diolah, 2015)

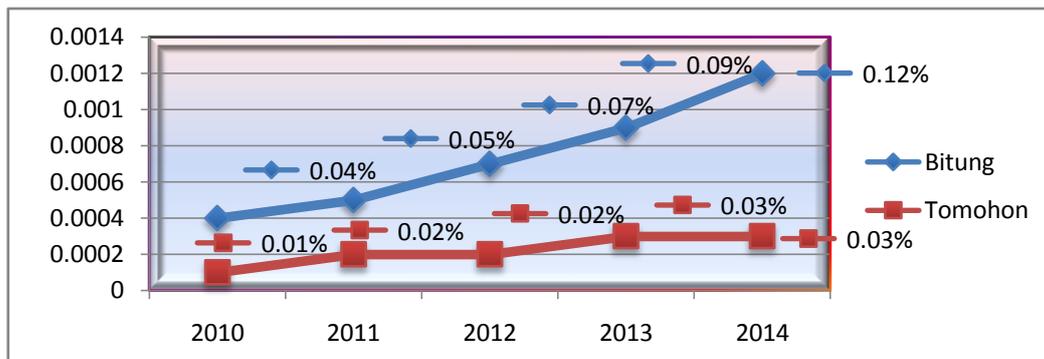
Tabel 4 menunjukkan bahwa Kota Bitung setiap tahunnya terus mengalami tren positif pertumbuhan tingkat kemandirian keuangan meskipun tingkat pertumbuhannya masih amat kecil, dan hanya bertumbuh sekitar 0.01% – 0.03% setiap tahunnya namun perlahan-lahan tingkat kemandirian Kota Bitung terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 5. Perhitungan Tingkat Kemandirian Kota Tomohon

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Transfer	Rasio	Kemampuan Keuangan
2010	5.713.312.995	339.626.982.485	0.01%	Instruktif
2011	8.095.029.622	374.949.210.527	0.02%	Instruktif
2012	11.241.635.125	376.980.930.356	0.02%	Instruktif
2013	13.945.339.275	447.366.644.780	0.03%	Instruktif
2014	20.100.568.636	506.406.267.817	0.03%	Instruktif
Rata-rata			0.02%	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Tomohon (Data diolah, 2015)

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan kemandirian Kota Tomohon setiap dua tahun terus mengalami peningkatan meskipun hanya 0.01%, hal ini tentu menggambarkan kemampuan Kota Tomohon sebagai Kota Ekowisata sekalipun belum mampu mencapai tingkat kemandirian yang kemampuannya masih berada pada pola hubungan instruktif.



Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Data olahan, 2015.

Gambar 1 menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kemandirian keuangan pada Kota Bitung dan Tomohon bahwa tingkat kemampuan selama lima tahun rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 6. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Bitung

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio	Kemampuan Keuangan
2010	18.763.528.960,85	446.819.398.413,85	0.04%	Sangat Kurang
2011	25.394.063.796,63	490.636.327.652,63	0.05%	Sangat Kurang
2012	38.435.120.911,59	555.570.392.064,59	0.06%	Sangat Kurang
2013	55.173.113.990,88	651.336.944.328,88	0.08%	Sangat Kurang
2014	83.529.151.103	745.132.180.691	0.11%	Sangat Kurang
Rata-rata			0.07%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2015.

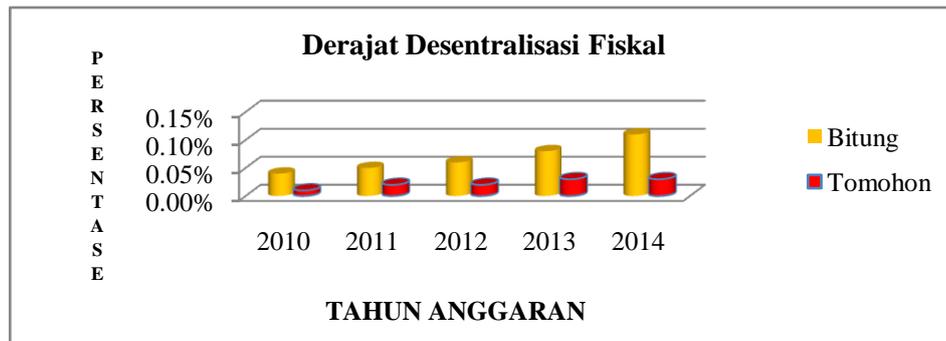
Tabel 6 menjelaskan bahwa kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal pada Kota Bitung pada periode 2010-2014 yang setiap tahunnya mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 0.01% - 0.03%.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Tomohon

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio	Kemampuan Keuangan
2010	5.713.312.995	345.340.295.480	0.01%	Sangat Kurang
2011	8.095.029.622	383.044.240.149	0.02%	Sangat Kurang
2012	11.241.635.125	388.641.585.596	0.02%	Sangat Kurang
2013	13.945.339.275	461.311.984.055	0.03%	Sangat Kurang
2014	20.100.568.636	528.035.636.453	0.03%	Sangat Kurang
Rata-rata			0.02%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2015.

Tabel 7 menunjukkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pada Kota Tomohon pada tahun 2010-2014 kemampuan keuangan setiap dua tahunnya menurun yaitu mencapai 0.01%.



Gambar 2. Hasil Pertumbuhan Tingkat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Bitung dan Kota Tomohon

Sumber: Data olahan, 2015.

Hasil pertumbuhan tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan kota Bitung dan Tomohon masih berada pada tingkat kemampuan yang sangat kurang, yaitu rata-rata rasionya 0.07% pada Kota Bitung dan Kota Tomohon rata-rata rasionya 0.02% yang berada pada skala interval 0.00% - 10.00%.

Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Tabel 8. Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Bitung

Tahun	PAD	Pengeluaran Rutin	Rasio	Kemampuan Keuangan
2010	18.763.528.960,85	343.331.542.956	0.05%	Sangat Kurang
2011	25.394.063.796,63	380.005.130.183	0.06%	Sangat Kurang
2012	38.435.120.911,59	409.011.702.380	0.09%	Sangat Kurang
2013	55.173.113.990,88	457.515.086.976,49	0.12%	Sangat Kurang
2014	83.529.151.103	541.529.181.889	0.15%	Sangat Kurang
Rata-rata			0.13%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2015.

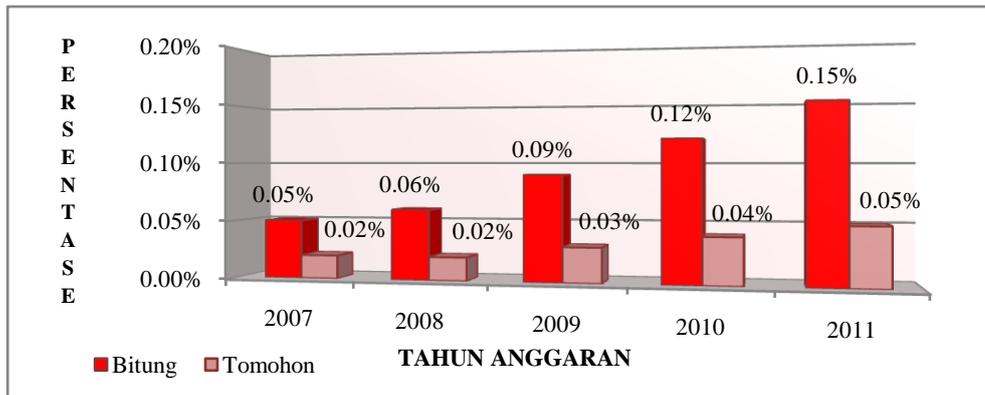
Tabel 8 menunjukkan bahwa setiap tahunnya pertumbuhan rasio pada Kota Bitung meningkat 0.01% - 0.03% dan Rata-rata indeks kemampuan rutin pada Kota Bitung sebesar 0.13%, yang berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kota Tomohon

Tahun	PAD	Pengeluaran Rutin	Rasio	Kemampuan Keuangan
2010	5.713.312.995	234.634.918.964	0.02%	Sangat Kurang
2011	8.095.029.622	280.182.016.843	0.02%	Sangat Kurang
2012	11.241.635.125	297.559.832.405	0.03%	Sangat Kurang
2013	13.945.339.275	327.618.619.755	0.04%	Sangat Kurang
2014	20.100.568.636	368.371.685.971	0.05%	Sangat Kurang
Rata-rata			0.03%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2015.

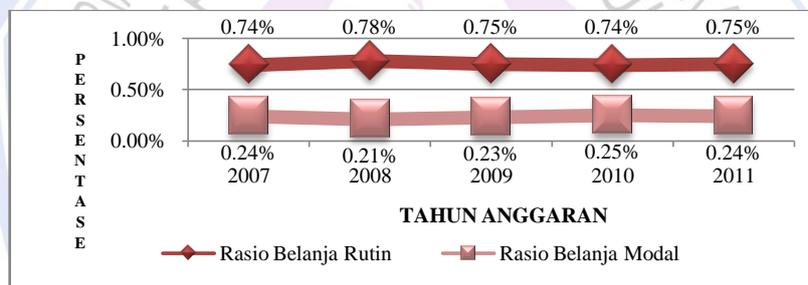
Tabel 9 menunjukkan setiap tahunnya pertumbuhan rasio pada Kota Tomohon meningkat 0.01% dan Rata-rata indeks kemampuan rutin pada Kota Bitung sebesar 0.03%, yang berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin.



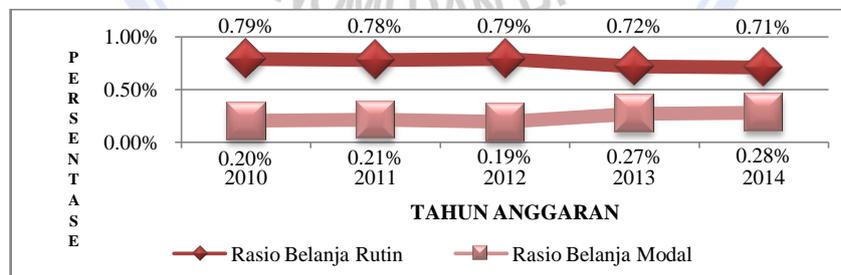
Gambar 3. Hasil Pertumbuhan Tingkat Indeks Kemampuan Rutin Kota Bitung dan Kota Tomohon
 Sumber: Data diolah, 2015

Gambar 3 menunjukkan perbandingan dapat dilihat pada Kota Bitung pada rasionya berkisar 0.05% - 0.15% dibandingkan Kota Tomohon yang masih dibawah rasionya yaitu 0.02% - 0.05%. Berarti dapat disimpulkan, bahwa Kota Bitung lebih unggul dalam hal membiayai pengeluaran rutinnya akan tetapi dalam hal kemampuan keuangannya masih dinilai sangat kurang.

Rasio Kecerasan



Gambar 4. Hasil perhitungan Rasio Kecerasan Kota Bitung
 Sumber: Data diolah, 2015



Gambar 5. Hasil perhitungan Rasio Kecerasan Kota Tomohon
 Sumber: Data diolah, 2015

Gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa rasio belanja rutin Kota Bitung dan Kota Tomohon persentasenya lebih tinggi dibandingkan rasio belanja modal, sehingga belum memprioritaskan terhadap pembangunan daerah, namun pada faktanya belanja modal naik meskipun relatif kecil.

Rasio Pertumbuhan**Tabel 10. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Bitung**

	2010	2011	2012	2013	2014
PAD	-	0.26%	0.33%	0.30%	0.33%
Total Pendapatan	-	0.08%	0.11%	0.14%	0.12%
Belanja Rutin	-	0.09%	0.07%	0.10%	0.15%
Belanja Modal	-	(0.09%)	0.25%	0.18%	0.13%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 10 menunjukkan bahwa pada belanja modal Kota Bitung pada tahun 2011 mengalami penurunan (0.09%) bukannya pertumbuhan namun pada tahun berikutnya mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 0.19% pada tahun 2012 dan berkurang pertumbuhannya pada tahun 2014, yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang negatif. Dalam tabel tersebut terlihat pertumbuhan nilai pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja modal dan tingginya pertumbuhan belanja rutin.

Tabel 11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kota Tomohon

	2010	2011	2012	2013	2014
PAD	-	0.29%	0.27%	0.19%	0.30%
Total Pendapatan	-	0.09%	0.01%	0.15%	0.12%
Belanja Rutin	-	0.19%	0.06%	0.10%	0.12%
Belanja Modal	-	0.30%	(0.04%)	0.67%	0.18%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 11 menunjukkan bahwa pada Kota Tomohon rasio belanja modal pada tahun 2011 mencapai 0.30% lalu menurun di tahun 2012 sebesar (0.04)% kemudian naik sebesar 0.67% dan sampai pada tahun 2014 menurun sebesar 0.18%, yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang negatif. Dalam tabel tersebut terlihat pertumbuhan nilai pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja modal dan tingginya pertumbuhan belanja rutin.

Pembahasan**Analisis Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan**

Hasil analisis ini menunjukkan Kota Bitung dalam menggali sumber pendapatan asli daerah lebih tinggi perolehannya dibandingkan Kota Tomohon serta bantuan pemerintah pusat/provinsi ataupun pinjaman lebih rendah bantuannya dibandingkan Kota Tomohon. Namun dalam kemampuan keuangan Kota Bitung dan Tomohon masih berada pola hubungan instruktif, yaitu tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Hasil analisis ini mendapatkan hasil yang sama seperti penelitian Mahardika (2011) yaitu masih rendahnya kemampuan keuangan pemerintah pada rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tabanan periode 2007 – 2011.

Analisis Perbandingan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil analisis ini menunjukkan pemerintah Kota Bitung lebih unggul dilihat dari derajat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah dibandingkan Kota Tomohon yang masih rendah perolehan derajat kontribusi. Namun dalam kemampuan keuangan Kota Bitung dan Tomohon masih sangat kurang melaksanakan otonomi daerah. Hasil analisis ini mendapatkan hasil yang sama seperti penelitian Efendi (2011) yaitu masih rendahnya kemampuan keuangan pemerintah di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Analisis Perbandingan Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Hasil analisis ini menunjukkan tingkat rasio indeks kemampuan rutin masih amat kecil dan tergolong sangat kurang mampu membiayai pengeluaran rutin yang dilakukan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai total pengeluaran rutin daerah masih berada dibawah skala interval

20% yang menyebabkan sebagian besar total pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran rutin Kota Bitung dan Tomohon.

Analisis Perbandingan Rasio Keserasian

Hasil analisis ini menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kota Bitung dan Tomohon masih memprioritaskan kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD relatif kecil. Ini dilihat dari rasio belanja operasi pada Kota Bitung dan Tomohon yang setiap tahunnya lebih besar dibandingkan belanja modal. Dengan ini dapat dilihat Kota Bitung dan Tomohon masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Analisis Perbandingan Rasio Pertumbuhan

Hasil analisis ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif, karena pada rasio pendapatan asli daerah, rasio total pendapatan, rasio belanja rutin atau operasi yang semakin tinggi, dan diikuti semakin rendahnya tingkat rasio belanja modal atau pembangunan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Kota Bitung dan Tomohon belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode ke periode yang berikutnya. Hasil analisis ini mendapatkan hasil yang sama seperti penelitian Efendi (2011) yaitu masih rendahnya kemampuan keuangan pemerintah di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Analisis perbandingan kemandirian pada Kota Bitung selama lima tahun terakhir lebih unggul pengelolaan keuangannya dibandingkan Kota Tomohon meskipun dalam pola hubungan instruktif.
2. Analisis perbandingan derajat desentralisasi fiskal pada periode 2010 – 2014 menunjukkan bahwa Kota Bitung dalam menggali sumber pendapatan asli daerah lebih optimal dibandingkan Kota Tomohon namun masih tergolong sangat kurang kemampuan keuangannya.
3. Analisis perbandingan indeks kemampuan rutin yang kemampuan pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran rutin daerah pada Kota Bitung lebih mampu dibandingkan Kota Tomohon namun dalam skala interval 0,00-20% yang dinilai sangat kurang.
4. Analisis perhitungan keserasian pada Kota Bitung dan Tomohon lebih memprioritaskan belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan daerah.
5. Analisis pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bitung dan Tomohon menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif, karena pertumbuhan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, melainkan diikuti belanja rutin.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah Kota Bitung dan Tomohon lebih ditingkatkan lagi pendapatan asli daerah dengan cara ketaatan wajib pajak dan membayar retribusi serta perlu ditingkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah yang diikuti kualitas, kemudahan, dan ketepatan serta kecepatan pelayanan, dan juga memacu pengembangan badan usaha milik daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, David. 2011. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan OTODA di Kabupaten nganjuk. *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 5 No 1*.
<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/400/449> Diakses pada 12 jui 2015 Hal. 105-113.
- Halim, Abdul. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah. Edisi ketiga*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahardika, I Gusti Ngurah Suryaadi. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Economi dan Bisnis Vol 8 No 2*.
<http://download.portalgaruda.org/article>. Diakses pada 12 juni 2015 Hal. 733-750.
- Mahmudi. 2010. *Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik: Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. *Permendagri Nomor 13 Pasal 16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *Permendagri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Mengenai Kelompok Belanja*. Jakarta.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Pasal 18 tentang Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 156 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol 5 No 2* November. <http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2001> Diakses tanggal 7 Juni 2015 Hal 20-22.